



Pengelolaan Pengawasan Pemilu Lokal (PPL) Dalam Pengajuan Honor Panwascam Ke Bawaslu Kabupaten Jember

Mariyatul Nur Affa¹, Diana Masita², Itsbat Ubaydillah³, M.F. Hidayatullah⁴

Program Studi Akutansi syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

dianamasita33@gmail.com¹, itsbatubaydillah49@gmail.com², mariyatulnuraffa@gmail.com³, mf.hidayatullah@uinkhas.ac.id⁴

Info Artikel

Masuk:

15 Februari 2024

Diterima:

20 Februari 2024

Diterbitkan:

27 Februari 2024

Kata Kunci:

Pengawasan Pemilu,
Panwascam, Bawaslu,
Honor, Evaluasi.

Abstrak

Pengawasan Pemilu Lokal (PPL) merupakan bagian integral dari proses demokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk memastikan keberlangsungan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Salah satu elemen penting dalam PPL adalah pengajuan honor Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember. Proses pengajuan honor ini memerlukan sistem yang teratur dan transparan guna memastikan bahwa pengawas pemilu menerima penghargaan yang pantas atas kontribusi mereka. Pertama, proses pengajuan honor Panwascam ke Bawaslu Kabupaten Jember dimulai dengan pengumpulan data mengenai kinerja dan partisipasi Panwascam selama masa pengawasan pemilu. Hal ini meliputi pencatatan aktivitas pengawasan, jumlah jam kerja, serta laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota Panwascam. Kedua, setelah data terkumpul, Panwascam melakukan verifikasi dan validasi terhadap informasi yang tercatat. Proses verifikasi ini penting untuk memastikan keabsahan data dan meminimalisir potensi kesalahan atau penyalahgunaan dalam pengajuan honor kepada Bawaslu. Ketiga, setelah verifikasi selesai, Panwascam menyusun laporan akhir yang memuat rincian aktivitas dan prestasi selama masa pengawasan. Laporan ini menjadi dasar untuk menghitung jumlah honor yang layak diterima oleh masing-masing anggota Panwascam. Keempat, laporan akhir kemudian disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Jember untuk proses evaluasi lebih lanjut. Bawaslu akan melakukan penilaian terhadap kinerja Panwascam berdasarkan laporan yang disampaikan serta kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kelima, dalam proses evaluasi, Bawaslu juga akan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti tingkat kehadiran, kualitas laporan, serta kontribusi dalam menyelesaikan potensi pelanggaran pemilu yang terjadi di wilayah kecamatan masing-masing. Keenam, setelah evaluasi selesai, Bawaslu Kabupaten Jember akan menetapkan jumlah honor yang akan diberikan kepada Panwascam. Penetapan ini dilakukan dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia serta keadilan dalam pemberian honor kepada setiap anggota Panwascam. Ketujuh, setelah penetapan honor, Bawaslu Kabupaten Jember akan mengumumkan keputusan tersebut kepada Panwascam dan memberikan petunjuk mengenai prosedur pencairan honor yang akan dilakukan. Kesimpulannya, pengajuan honor Panwascam ke Bawaslu Kabupaten Jember melibatkan serangkaian proses yang meliputi pengumpulan data, verifikasi, penyusunan laporan, evaluasi, penetapan honor, dan pengumuman keputusan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengawas pemilu mendapatkan penghargaan yang sesuai dengan kontribusi dan kinerja mereka dalam menjaga integritas dan kelancaran pelaksanaan pemilu di tingkat kecamatan.

PENDAHULUAN

Pengawasan Pemilu Lokal (PPL) merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga integritas dan kredibilitas proses demokrasi di tingkat lokal di Indonesia. Di tengah dinamika pemilu yang semakin kompleks, peran Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) menjadi sangat penting dalam memastikan terlaksananya pemilu yang bersih, jujur, dan adil di tingkat kecamatan. Salah satu aspek yang tidak kalah penting adalah pengajuan honor Panwascam kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember. Pengajuan honor Panwascam ke Bawaslu Kabupaten Jember merupakan langkah penting dalam memperhatikan penghargaan atas kontribusi nyata para pengawas pemilu di tingkat kecamatan. Proses ini tidak hanya sekadar administratif, melainkan mencerminkan penghargaan dan pengakuan terhadap peran serta dedikasi para anggota Panwascam dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks Kabupaten Jember, di mana

dinamika politik dan pemilu bisa menjadi sangat kompleks, pengawasan yang efektif dan bertanggung jawab dari Panwascam menjadi kunci keberhasilan terlaksananya pemilu yang bersih dan adil.

Dalam pandangan yang lebih luas, pengajuan honor Panwascam juga menjadi cerminan dari keseriusan dan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung proses demokrasi yang berkualitas. Dengan memberikan penghargaan yang layak kepada para pengawas pemilu, pemerintah daerah juga memberikan sinyal kuat bahwa mereka menghargai dan mendukung upaya-upaya untuk memastikan proses pemilu berlangsung secara adil dan transparan. Namun, di balik pentingnya pengajuan honor Panwascam terdapat serangkaian proses yang kompleks dan memerlukan koordinasi yang baik antara Panwascam sebagai pelaksana langsung, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu, dan pemerintah daerah sebagai penyelenggara. Dari mulai pengumpulan data, verifikasi, evaluasi, hingga penetapan honor, setiap tahapan harus dilakukan secara cermat dan transparan untuk memastikan bahwa pengawas pemilu mendapatkan penghargaan yang pantas atas kontribusi mereka.

Dalam konteks ini, pendahuluan menjadi titik awal yang penting untuk memahami kompleksitas dan signifikansi dari proses pengajuan honor Panwascam ke Bawaslu Kabupaten Jember. Pendahuluan ini memberikan landasan untuk memahami konteks, relevansi, dan urgensi dari pengajuan honor tersebut dalam konteks demokrasi lokal dan integritas pemilu di tingkat kecamatan.

Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka mengenai Pengelolaan Pengawasan Pemilu Lokal (PPL) terutama terkait dengan pengajuan honor Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember menunjukkan bahwa topik ini menjadi perhatian dalam literatur terkait demokrasi, pemilu, dan tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.

Beberapa penelitian telah menyoroti peran penting Panwascam dalam memastikan integritas dan transparansi dalam pelaksanaan pemilu di tingkat kecamatan. Menurut Ahmad (2019), Panwascam memiliki peran strategis dalam mengawasi proses pemilu di tingkat lokal, termasuk memastikan keberlangsungan pemilu yang adil dan bersih. Namun, Ahmad juga menyoroti tantangan dalam pengelolaan Panwascam, termasuk masalah sumber daya dan pengakuan atas kontribusi mereka.

Studi oleh Budiarto (2020) menyoroti pentingnya penghargaan dan insentif bagi para pengawas pemilu di tingkat kecamatan. Menurut Budiarto, penghargaan yang diberikan kepada Panwascam tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga dapat meningkatkan motivasi dan kinerja mereka dalam menjalankan tugas pengawasan. Implikasi kebijakan terkait dengan pengajuan honor Panwascam juga menjadi perhatian dalam penelitian ini.

Selain itu, Tinjauan pustaka juga mengungkapkan bahwa proses pengajuan honor Panwascam ke Bawaslu Kabupaten Jember tidak selalu berjalan lancar. Penelitian oleh Cahyono (2018) menunjukkan adanya tantangan dalam proses administrasi dan koordinasi antara Panwascam dan Bawaslu dalam hal pengumpulan data, verifikasi, dan penentuan jumlah honor yang layak.

Namun demikian, meskipun ada tantangan, penelitian oleh Susanto (2021) menunjukkan bahwa implementasi proses pengajuan honor Panwascam yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas pemilu di tingkat kecamatan. Dengan memberikan penghargaan yang layak kepada para pengawas pemilu, Bawaslu Kabupaten Jember dapat memperkuat legitimasi dan otoritasnya sebagai lembaga pengawas pemilu di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, tinjauan pustaka menunjukkan bahwa pengajuan honor Panwascam ke Bawaslu Kabupaten Jember merupakan topik yang kompleks dan penting dalam konteks pengawasan pemilu lokal. Peran Panwascam, proses administrasi, implikasi kebijakan, serta dampaknya terhadap integritas dan transparansi pemilu menjadi fokus utama dalam literatur terkait.

METODE

Penelitian Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan observasi dan studi pustaka memberikan wawasan mendalam tentang Pengelolaan Pengawasan Pemilu Lokal (PPL) terkait dengan pengajuan honor Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember. Observasi langsung memberikan pemahaman tentang proses praktis dan dinamika interaksi yang terjadi di lapangan, sementara studi pustaka memungkinkan penyelidikan yang mendalam terhadap konteks, teori, dan temuan terdahulu yang relevan dengan topik tersebut. Metode observasi dilakukan dengan menyaksikan secara langsung proses pengumpulan data, verifikasi, dan evaluasi yang dilakukan oleh Panwascam dalam rangka pengajuan honor ke Bawaslu. Observasi ini memberikan wawasan tentang bagaimana proses tersebut dijalankan secara praktis, termasuk interaksi antar anggota Panwascam, prosedur administratif yang digunakan, serta permasalahan yang mungkin muncul selama proses tersebut berlangsung. Selain itu, metode studi pustaka memberikan landasan teoritis dan kontekstual yang penting dalam memahami kompleksitas dan signifikansi dari pengajuan honor Panwascam ke Bawaslu Kabupaten Jember. Melalui analisis terhadap literatur terkait demokrasi, pemilu, tata kelola pemerintahan, dan pengawasan pemilu, peneliti dapat memahami peran, tantangan, serta implikasi kebijakan terkait dengan topik ini. Penelitian sebelumnya dalam bentuk studi pustaka juga dapat memberikan insight tentang faktor-faktor yang memengaruhi proses pengajuan honor Panwascam, seperti kebijakan pemerintah daerah, mekanisme alokasi anggaran, dan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan PPL. Analisis terhadap temuan-temuan tersebut dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi potensi perbaikan atau inovasi dalam proses pengajuan honor Panwascam di masa mendatang. Kombinasi antara metode observasi dan studi pustaka memungkinkan peneliti untuk

mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan holistik tentang pengelolaan PPL terkait dengan pengajuan honor Panwascam ke Bawaslu Kabupaten Jember. Dengan memadukan wawasan praktis dari observasi langsung dengan pemahaman teoritis dari studi pustaka, peneliti dapat menggambarkan secara akurat dinamika, tantangan, dan peluang yang terkait dengan topik ini. Selain itu, metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif multipel tentang pengajuan honor Panwascam, baik dari segi praktis maupun konseptual. Hal ini penting dalam memastikan bahwa temuan penelitian memiliki relevansi yang tinggi dengan kebutuhan praktis dan akademis dalam konteks pengawasan pemilu di tingkat kecamatan. Dengan demikian, melalui kombinasi metode observasi dan studi pustaka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman dan pengembangan praktik terbaik dalam pengelolaan PPL terkait dengan pengajuan honor Panwascam ke Bawaslu Kabupaten Jember.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan tentang Pengelolaan Pengawasan Pemilu Lokal (PPL) terkait dengan pengajuan honor Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember menjadi topik yang menarik untuk dieksplorasi dalam konteks pengawasan pemilu di tingkat lokal. Pembahasan ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari signifikansi peran Panwascam, proses pengajuan honor, hingga implikasi kebijakan yang terkait.

Pertama-tama, penting untuk menggarisbawahi peran strategis Panwascam dalam menjaga integritas dan transparansi pemilu di tingkat kecamatan. Panwascam bertugas untuk melakukan pengawasan secara langsung di lapangan, memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menindaklanjuti potensi pelanggaran pemilu yang terjadi.

Proses pengajuan honor Panwascam ke Bawaslu Kabupaten Jember menjadi cermin dari pengakuan terhadap kontribusi dan dedikasi para pengawas pemilu dalam menjalankan tugasnya. Pengajuan honor ini seharusnya mencerminkan evaluasi yang cermat terhadap kinerja dan partisipasi Panwascam selama periode pengawasan pemilu, serta memberikan apresiasi yang layak atas upaya mereka.

Namun, dalam pembahasan ini juga perlu diperhatikan bahwa proses pengajuan honor Panwascam tidak selalu berjalan mulus. Tantangan administratif, kurangnya transparansi, dan ketidaksetaraan dalam alokasi anggaran menjadi beberapa isu yang perlu diatasi dalam upaya meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam pengelolaan PPL.

Implikasi kebijakan terkait dengan pengajuan honor Panwascam juga menjadi bagian penting dalam pembahasan ini. Perlu adanya kebijakan yang jelas dan terukur dalam menentukan kriteria penilaian, prosedur pengajuan, serta alokasi anggaran untuk penghargaan ini guna memastikan keadilan dan akuntabilitas dalam pemberian honor kepada Panwascam.

Selain itu, pembahasan juga dapat melibatkan aspek partisipatif, di mana melibatkan stakeholder terkait, seperti Panwascam, Bawaslu, dan pemerintah daerah, dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pengajuan honor. Partisipasi mereka dalam merumuskan kebijakan dapat meningkatkan legitimasi dan penerimaan terhadap keputusan yang diambil.

Dalam konteks Kabupaten Jember, pembahasan juga dapat melibatkan analisis terhadap dinamika politik dan sosial lokal yang memengaruhi pengelolaan PPL dan pengajuan honor Panwascam. Memahami konteks lokal ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat efektivitas pengawasan pemilu di tingkat kecamatan.

Pembahasan juga harus mempertimbangkan upaya-upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam proses pengajuan honor Panwascam. Langkah-langkah konkret, seperti penggunaan teknologi informasi, penguatan mekanisme pengawasan internal, dan pelatihan bagi anggota Panwascam, dapat menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan PPL.

Secara keseluruhan, pembahasan tentang PPL terkait dengan pengajuan honor Panwascam ke Bawaslu Kabupaten Jember haruslah holistik dan komprehensif. Memperhatikan berbagai aspek yang terkait, mulai dari peran Panwascam, proses pengajuan honor, implikasi kebijakan, hingga konteks lokal, akan membantu dalam merumuskan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan integritas dan kualitas pengawasan pemilu di tingkat kecamatan.

KESIMPULAN

Secara kesimpulan, pengelolaan Pengawasan Pemilu Lokal (PPL) terkait dengan pengajuan honor Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember adalah bagian integral dari upaya menjaga integritas dan transparansi dalam proses demokrasi di tingkat lokal. Peran Panwascam sebagai garda terdepan dalam mengawasi pelaksanaan pemilu di tingkat kecamatan menjadi sangat penting, dan pengajuan honor merupakan salah satu bentuk pengakuan atas kontribusi dan dedikasi mereka. Meskipun demikian, proses pengajuan honor Panwascam tidaklah tanpa tantangan. Tantangan administratif, kurangnya transparansi, dan kesenjangan dalam alokasi anggaran menjadi beberapa isu yang perlu ditangani lebih lanjut. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efisiensi, keadilan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan PPL dan pengajuan honor Panwascam. Implikasi kebijakan menjadi aspek krusial yang perlu diperhatikan dalam konteks ini. Penyusunan kebijakan yang jelas, transparan, dan partisipatif dapat membantu meningkatkan proses pengajuan honor, serta memastikan bahwa penilaian atas kinerja Panwascam dilakukan secara obyektif dan adil. Penting juga untuk memperkuat partisipasi dan keterlibatan semua pihak terkait, termasuk Panwascam, Bawaslu, dan pemerintah daerah, dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan

keputusan terkait dengan pengajuan honor. Partisipasi ini akan memperkuat legitimasi keputusan yang diambil, serta memastikan bahwa kepentingan semua pihak dipertimbangkan dengan baik. Dalam konteks Kabupaten Jember, pemahaman yang mendalam terhadap dinamika politik, sosial, dan budaya lokal menjadi kunci untuk merancang strategi yang tepat dalam pengelolaan PPL dan pengajuan honor Panwascam. Memperhatikan konteks lokal akan membantu dalam mengidentifikasi potensi perbaikan dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang ada. Kesimpulannya, pengajuan honor Panwascam ke Bawaslu Kabupaten Jember bukanlah sekadar masalah administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemilu di tingkat kecamatan. Dengan menghadapi tantangan-tantangan yang ada dan memperkuat kerjasama antarstakeholder, diharapkan proses pengajuan honor dapat menjadi lebih efisien, adil, dan berdampak positif dalam mendukung demokrasi yang berkualitas di tingkat lokal

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian jurnal ini. Terutama, kami berterima kasih kepada:

Responden, yang telah meluangkan waktu dan usaha untuk memberikan informasi yang sangat berharga melalui partisipasi aktif mereka dalam survei yang saya lakukan. Tanpa kerjasama dan kesediaan mereka untuk berbagi pengalaman dan pandangan, penelitian ini tidak akan dapat mencapai kedalaman dan kekayaan informasi seperti yang telah kami peroleh.

Bapak Dr. Mf Hidayatullah, S.H.I.,M.S.I, yang telah bekerja tanpa lelah dalam merancang, melaksanakan, dan menganalisis data penelitian ini. Kerja keras, dedikasi, dan komitmen mereka terhadap keunggulan akademik telah menjadi tulang punggung dari keberhasilan penelitian ini. yang dengan sabar dan penuh dedikasi telah memberikan arahan, kritik, dan saran yang konstruktif sepanjang proses penelitian. Bimbingan mereka telah membentuk pemikiran dan analisis kami dalam merumuskan kesimpulan yang berharga dari penelitian ini.

ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atas dukungan logistik dan akses yang telah diberikan sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dengan lancar. Kepercayaan dan dukungan institusi ini terhadap penelitian kami sangat kami hargai.

Keluarga dan Teman-teman, yang dengan setia memberikan dukungan moral dan motivasi. Kesabaran, pengertian, dan dorongan mereka telah menjadi sumber kekuatan kami dalam menghadapi tantangan selama proses penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Afin. Menciptakan SDM Berkualitas. PT. Gelora Aksara Pratama. Jakarta. .2013.
- Ahmad, S., Mustafa, M., Ullah, A., Shoaib, M., Mushtaq, M., & Ali, W. (n.d). Role of Types of Electoral Rigging, Socio-economic Status, Politics and Voting Behavior in Formation of Attitude towards Electoral Integrity. Transforming Government: People, Process and Policy.
- Djarot Hindarto. "Comparative Analysis VGG16 Vs MobileNet Performance for Fish Identification", International Journal Software Engineering and Computer Science (IJSECS),2023
- Journal.budiluhur. (2023). Judul artikel. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 12(2). Diakses dari <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/akeu>
- Wiyono, B. B. 2007. Metodologi Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Action Research). Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang
- Bawaslu Jember. (2019). Bawaslu Jember melakukan supervisi di Panwaslu kecamatan terkait potensi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilu 2024. Diakses dari <https://jember.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-jember-melakukan-supervisi-di-panwaslu-kecamatan-terkait-potensi-permohonan>
- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). (2014). Laporan Pengawasan Pilpres 2014. Diakses dari https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/Laporan%20Pengawasan%20Pilpres%202014.pdf
- Glints. (2024). Honor Panwascam Pemilu 2024. Diambil dari <https://glints.com/id/lowongan/honor-panwascam-pemilu-2024/>
- Inspektorat Sulawesi Barat. (2017). Pengertian pengawasan dan jenis pengawasan (Part 1). Diakses dari <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/>
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2024). Manajemen pengawasan. Diakses dari <https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/katapel/manajemen-pengawasan.php>

- Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2020). Perbawaslu No. 1 Tahun 2020 tentang Pola Hubungan (Perabawaslu12020polhub). Diakses dari https://jdih.go.id/files/99/perbawaslu_2020_1_perabawaslu12020polhub.pdf
- Achmad Fauzan Sirat, A. B. (2019). Sinkronisasi kebijakan honorarium standar biaya dalam kerangka single remunerasi penganggaran berbasis kinerja. Jurnal Anggaran, 1(1), 1-20. <https://anggaran.e-journal.id/artikel/sinkronisasi-kebijakan-honorarium>